DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ajat Sudrajat Havid, 2008, Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum Dan Ham Ri, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Direktorat Jenderal Imigrasi,2000, "*Imigrasi Daftar Ulang Warga Negara Asing*", Pintu Gerbang Nomor 42, Jakarta.

Direktorat Jendral Imigrasi, 2005 Departemen Hukum Dan HAM RI, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta.

H. Abdullah Sjahriful (james), S.H., 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

I Wayan Tangun Susila, 1993, "*Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*", Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI, Denpasar.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bai Orang Asing di Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika*.

M.iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Jakarta, PNRI, 2007

Saleh Wiramiharja, 2002, *Langkah-Langkah Baru Menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*", Pintu Gerbang Nomor 45, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Gentha Publishing, 2009

Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Setianingsih, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Sudarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, *Hukum Pidana I,* Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990

Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1989, Jakarta

T.S.G. Mulia K.A.H. Hidding, ensiklopediaindonesia, jilid II, Penerbitan W. van Hoeve. Bandung's-Gravenhage

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Pencegahan dan Penangkalan yang Bersifat Keimigrasian

C. Sumber Lain

Direktorat Jendral Imigrasi, *Bimbingan Teknis Penindakan*, Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012.

www.lampung-news.com/article/kriminal/6459/1/print/

http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html, diakses Pada Tanggsl 12 Oktober 2015

www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/137530/daerah/dalam_2_tahun_terakhir_99_imigran_gelap_diamankan_kantor_imigrasi_kelas_i_bandar_lampung.html